

## **ANALISIS PENYALURAN ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN KHUSUSNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG ADA DI KABUPATEN JEMBRANA**

**Ni Wayan Nopi Tirta Wahyuni, Made Dinda Mariadi, Putu Sintya Indriani Putri, Komang Ayu Junika Triana**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana, tindakan yang perlu diambil pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana, dan penyaluran anggaran dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Jembrana. Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara : dokumentasi di Kabupaten Jembrana yang tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana. Dari hasil penelitian ini, maka perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari pembangunan transportasinya, transportasi di bagi kembali menjadi dua pembangunan infrastruktur mengacu dari skala prioritas dengan memperhatikan jumlah pemanfaat dan memperhatikan akses ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

**Kata Kunci: Penyaluran, Anggaran, Pembangunan, Insfrakstruktur**

### **Abstract**

*This study discusses infrastructure development in Jembrana Regency, actions that the government needs to take in developing infrastructure in Jembrana Regency, and channeling the budget in Jembrana Regency infrastructure development. Data analysis method used is descriptive method using quantitative. In this study the source of the data used is secondary data obtained from the Regional Development Planning Board of Jembrana Regency. The data collection method used is a field research (Field Research) by directly linking research objects that discuss by: searching in Jembrana District found in the Regional Development Planning Board of Jembrana Regency. From the results of this study, the construction of infrastructure development in Jembrana Regency can be seen from the development of transportation, transportation in returning to infrastructure development that requires funds from considering the number of beneficiaries and paying attention to economic access to improve the community in Jembrana Regency.*

**Keywords : Distribution, Budget, Construction, Infrastructure**

## 1. Pendahuluan

Infrastruktur merupakan seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pembangunan infrastruktur suatu Negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Jika pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluaran infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat pusat (nasional) dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur publik merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari pembayaran pajak oleh warga negara. Infrastruktur publik sangat penting artinya karena sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Kabupaten Jembrana merupakan akses utama yang menghubungkan jalur transportasi darat dari Pulau Jawa sampai dengan Denpasar yang merupakan ibu kota dari Pulau Bali.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk meningkatkan daya saing daerah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan sehingga mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa. Mengenai aturan tentang kewajiban membangun infrastruktur daerah Kabupaten Jembrana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah tentu harus mendapat perhatian serius, karena faktor terbesar yang dihadapi pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah Kabupaten Jembrana. Kondisi jalur utama transportasi darat yang di Kabupaten Jembrana memerlukan penataan khusus karena kondisinya yang kurang baik dan melihat jalur tersebut merupakan jalur nasional Denpasar-Gilimanuk.

Perhatian khusus yang perlu diberikan pada jalur nasional Denpasar-Gilimanuk seharusnya ditujukan pada penyaluran anggaran untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan utama yang menghubungkan Denpasar-Gilimanuk yang kualitasnya bisa dikatakan kurang baik. Kemudian kondisi jembatan pada jalan utama tersebut kurang baik sehingga jembatan tersebut tidak dapat dioperasikan secara maksimal, saat ini kondisi jembatan itu dalam tahap perbaikan. Selain kondisi infrastruktur transportasi yang kurang baik, infrastruktur seperti tenaga listrik kurang dioptimalkan dengan baik, dalam hal ini juga dapat dilihat dari pencahayaan pada jalan utama.

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah yang dilakukan yaitu bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana, apa saja tindakan yang perlu diambil pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana, bagaimana penyaluran anggaran dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Jembrana.

## 2. Metode

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis Penyaluran Anggaran dalam Pembangunan yang ada di Kabupaten Jembrana.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Data Kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif berupa berupa data tabel yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang disajikan dalam bentuk angka.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data untuk memperoleh data yang menjadi bahan analisis adalah data data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara :Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang beberapa pembangunan yang terjadi di Kabupaten Jembrana yang tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana

#### 2. Tinjauan Kepustakaan

Bentuk Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan dalam penyaluran anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut :

#### 1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

#### 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

### 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten/Kota diawali dengan musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan. Pada prinsipnya, usulan disusun dan disampaikan secara berjenjang/bertingkat mulai dari level RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan dimusyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten /Kota. Pada tahap Musrenbang Kabupaten/Kota, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program /usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD)

### 4. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait

### 5. Rencana Kerja ( Renja )

Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD Kabupaten Gunung kidul diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

### 6. RKA ( Rencana Kerja Anggaran )

Rencana Kerja dan Anggaran yang disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Dalam penganggaran pembangunan harus memperhatikan :

- RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dalam RPJMD, menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Dan,
- Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Adapun kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan

Tabel 1. Kegiatan Rehabilitas Pemeliharaan Jalan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	64,00 Km.	78,145 Km.	122,10	66,00 Km.	87,506 Km.	132,58	46,80 Km.	65,072 Km.	139,04

Dari pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan serapan anggaran terhadap pembangunan jalan sehingga kondisi jalan tetap dalam keadaan baik walaupun belum semua ruas jalan dapat direhabilitasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 139,04% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perbandingan IKU dengan target akhir RPJMD (Rehabilitas jalan)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMB)		%
		Target	Realisasi		Target	RealisasiTh 2015	
Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	46,80 Km.	65,072 Km.	139,04	46,80 Km.	65,072 Km.	139,04

Tabel 3. Pendukung Pencapaian IKU (Rehabilitas jalan dan jembatan)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Rehabilitasi pemeliharaan jalan	42.351.209.234.84	40.791.218.764	

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Tabel 4. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	%	3 Bh.	5 Bh.	166,67	3 Bh.	4 Bh	133,33	2 Bh.	2 Bh.	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa Program Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan porsi anggaran yang ada dan dari tahun 2013 s/d 2015 sudah terbangun 15 buah jembatan panjang 1.752 M yang dibangun dan tersebar di wilayah Kabupaten Jembrana. Akses jalan menuju lokasi jembatan kondisinya sulit dilalui. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016 kinerja baru tercapai 17,52 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Perbandingan IKU dengan target akhir RPJMD (Pembangunan jembatan)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi th 2015	
Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	%	2 Bh.	2 Bh.	100	2 Bh.	2 Bh.	100

Tabel 6. Pendukung Pencapaian IKU (Pembangunan Jembatan)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	2.982.783.000	2.936.905.000	

3. Kegiatan Rehabilitas atau pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tabel 7. Kegiatan Rehabilitas atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Indikator	Satuan	Tahun 2013	%	Tahun 2014	%	Tahun 2015	%
-----------	--------	------------	---	------------	---	------------	---

Kinerja Utama		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
Panjang saluran irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik	M'	4.219,00 M'	4.012,00 M'	95,09	5.466,66 M'	6.257,37 M'	114,46	5.466,66 M'	5.020,00 M'	91,83

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya berjalan sesuai dengan rencana dari tahun 2013 s/d 2015. Tidak ada kendala yang prinsip dalam melaksanakan program kegiatan ini. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 91,83 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD (Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMB)		%
		target	Realisasi		target	RealisasiTh 2015	
Panjang saluran irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik	M'	5.467 M'	5.020 M'	91,83	5.467 M'	5.020 M'	91,83

Tabel 9. Pendukung Pencapaian IKU (Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi	7.530.932.820	7.307.549.000	

4. Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) RDTR dan peraturan Zonasi

Jumlah rumah ber-IMB tahun ini - Jumlah rumah ber-IMB tahun sebelumnya x 100%

Tabel 10. Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RDTR dan peraturan Zonasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
% peningkatan Jlh rumah yg memiliki IMB	%	997	2.223	12.26	1000	2.583	3.60	300	3.085	5.02

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, ada peningkatan realisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 30 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD (penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) RDTR dan peraturan Zonasi)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMB)		%
		Target	Realisasi		target	RealisasiTh 2015	
% peningkatan Jlh rumah yg memiliki IMB	Unit	3.085	300	30,85	300	3.085	30

Tabel 12. Pendukung Pencapaian IKU (penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) RDTR dan peraturan Zonasi)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)RDTR dan peraturan Zonasi	198.126.200	165.848.606	

5. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Jumlah Perda RTRW dan turunnya

Tabel 13. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Jumlah Perda RTRW dan turunnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Keberadaan Perda RTRW	%	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Turunan Perda RTRW yang telah disusun masih berupa materi teknis belum berupa Perda. Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, turunan dari Perda RTRW baru 47,37 % yang dapat dibuatkan Rencana Rinciannya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD(Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Jumlah Perda RTRW dan turunnya)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	RealisasiTh 2015	
Keberadaan Perda RTRW	%	1	1	100	1	1	100

Tabel 15. Pendukung pencapaian IKU (Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Jumlah Perda RTRW dan turunnya)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan	359.907.200	281.275.500	

6. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air minum Jumlah RT pakai air bersih x 100%

Tabel 16. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air minum Jumlah RT pakai air bersih

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	%	25.000	33,35	13,34	26.000	34.68	13,33	23.000	30.68	13,33

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih mencapai setengah dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 77,76 . %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD (Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air minum Jumlah RT pakai air bersih)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	%	5	2.153.418.740	67.73	5	2.500.000.000	77.76

Tabel 18. Pendukung pencapaian IKU (Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air minum Jumlah RT pakai air bersih)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		PAGU	REALISASI	
Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan sarana dan prasarana air minum	3.179258.950	2.153.418.740	

#### 4. Simpulan dan Saran Simpulan

Perkembangan pembangunan infrastruktur di kabupaten Jembrana dapat dilihat dari pembangunan transportasinya, transportasi di bagi kembali menjadi dua yaitu Jalan menurut statusnya ada tiga jenis jalan di kabupaten Jembrana yaitu jalan Nasional (71,320 km), jalan Provinsi (30,870 km) dan jalan Kabupaten (941,023km). Panjang jalan di kabupaten Jembrana tahun 2015 yaitu 941,023 km dengan ruas jalan sebanyak 653 (aspal 915,522 km dan krikil 25,501 km). Jembatan nasional dari tahun 2013 tercatat berjumlah 38 jembatan hinggatahun 2015 dengan menggunakan bahan kontruksi beton. Jembatan provinsi dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tercatat sejumlah 3 dengan menggunkan bahan kontruksi beton. Jembatan kabupaten dari tahun 2013 sampai dengan 2015 tercatat sejumlah 96 dengan bahan kontruksi beton dan baja.

Dalam hal pembangunan infrastruktur di kabupaten Jembrana tindakan pemerintrah dalam hal ini adalah dengan melakukan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilakasanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdaarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Pertimbangan prioritas pembangunan infrastruktur mengacu dari skala prioritas dengan memperhatikan jumlah pemanfaat dan memperhatikan akses ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Prioritas pembangunan juga harus disesuaikan dengan RPJM dan renstra. Dalam penganggaran pembangunan harus memperhatikan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra.

### **Saran**

Dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana agar kedepannya dapat mengatur penyaluran anggaran untuk pembangunan infrastruktur agar masalah dalam pengalokasian dana ataupun penganggaran dana menjadi lebih baik, sehingga pembangunan infrastruktur mampu berjalan secara optimal dan terealisasi dengan baik.

### **DaftarPustaka**

- Anonym. Desember 2013. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli Definisi Tujuan Syarat Karakteristik*. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html>
- Anonym. Nopember 2018. *Infrastruktur: Jenis-jenis Infrastruktur dan Komponennya*. <http://www.artikelsiana.com/2018/11/Infrastruktur-jenis-infrastruktur-komponen-komponen.html>